

**Pengaruh Audit Internal dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap
“ Good Governance Government “
(Studi Empiris Pada SKPD di Wilayah Kota Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:
JENERY VIVI ADELINA
2009/13034**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

“Pengaruh Audit Internal dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap

Good Governance Government “

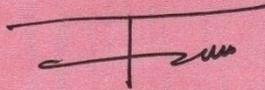
(Studi Empiris Pada SKPD di Wilayah Kota Bukittinggi)

Nama : Jenery Vivi Adelina
NIM/BP : 13034 / 2009
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2015

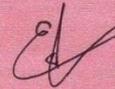
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



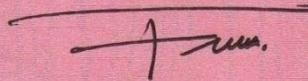
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Audit Internal dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance Government* (Studi Empiris Pada SKPD di Wilayah Kota Bukittinggi)

Nama : Jenery Vivi Adelina

Bp/Nim : 2009/13034

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

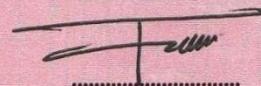
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2015

Tim Penguji :

Tanda Tangan

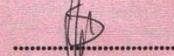
1. Ketua : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak



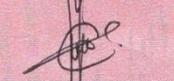
2. Sekretaris : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak



3. Anggota : Salma Taqwa, SE, M.Si



4. Anggota : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jenery Vivi Adelina
NIM/Thn. Masuk : 13034/2009
Tempat/Tgl. Lahir : Pekan Kamis / 27 Januari 1991
Program : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan mahoni, Lolong B, Padang Utara
No. HP/Telepon : 082284757136
Judul Skripsi : Pengaruh Audit Internal Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance Government

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2015
Yang menyatakan,



Jenery Vivi Adelina
NIM. 13034/2009

ABSTRAK

Jenery Vivi Adelina (13034/2009). Pengaruh Audit Internal dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance Government* (Studi Empiris Pada SKPD di Wilayah Kota Bukittinggi)

Pembimbing I :Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing II :Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh internal audit dan penatausahaan keuangan daerah terhadap *good governance government*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinas SKPD wilayah kota Bukittinggi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode *total sampling* dan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *good governance government*, sedangkan penatausahaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap *good governance government*.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Audit Internal dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance Government*” (Studi Empiris Pada SKPD di Wilayah Kota Bukittinggi)**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami penulis. Namun hambatan itu dapat diatasi berkat bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku penguji I dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini .

3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Nelvirita, SE, M.Si. Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kedua orang tua, dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II.KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN | |
| HIPOTESIS | |
| A. Kajian Teori..... | 11 |
| 1. Penertian Good Governance Government..... | 11 |
| 2. Audit Internal..... | 13 |
| 3. Penatausahaan Kuangan daerah..... | 22 |

| | |
|---------------------------------|----|
| B. Penelitian Relevan..... | 25 |
| C. Hubungan Antar Variabel..... | 28 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 32 |
| E. Perumusan Hipotesis..... | 32 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Populasi dan Sampel..... | 33 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 35 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 36 |
| E. Variabel penelitian..... | 37 |
| F. Pengukuran Variabel..... | 37 |
| G. Instrumen Penelitian..... | 39 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 40 |
| I. Defenisi Operasional..... | 47 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 49 |
| B. Demografi Responden..... | 50 |
| C. Deskripsi Hasil Penelitian..... | 55 |
| D. Statistic Deskriptif..... | 60 |
| E. Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 61 |
| F. Uji Asumsi Klasik..... | 63 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 67 |
| H. Uji Hipotesis..... | 69 |

| | |
|---|-----------|
| I. Pembahasan..... | 71 |
| BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Keterbatasan..... | 75 |
| C. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |
| LAMPIRAN..... | 81 |

DAFTAR TABEL

| Nama Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Daftar NamaSKPD Kota Bukittinggi..... | 34 |
| 2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat..... | 38 |
| 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian | 39 |
| 4. Tingkat Pengembalian Kuesioner | 49 |
| 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur..... | 50 |
| 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 51 |
| 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... | 52 |
| 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian | 53 |
| 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja..... | 54 |
| 10. Distribusi Frekuensi Variabel Good Governance Government | 55 |
| 11. Distribusi Frekuensi Variabel Audit Internal..... | 57 |
| 12. Distribusi Frekuensi Variabel Penatausahaan Keuangan Daerah | 58 |
| 13. Statistik Deskriptif | 60 |
| 14. Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil | 62 |
| 15. Nilai Cronbach's Alpha Instrumen Penelitian | 63 |
| 16. Uji Normalitas..... | 64 |
| 17. Uji Multikolinearitas | 65 |
| 18. Uji Heterokedastisitas | 66 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 19. Uji Koefisien Determinasi | 67 |
| 20. Koefisien Regresi Berganda..... | 68 |
| 21. Uji F | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| Nama Gambar | Halaman |
|-----------------------------|---------|
| 1. Kerangka Konseptual..... | 32 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nama Lampiran | Halaman |
|----------------------------------|----------------|
| 1 Kuesioner Penelitian..... | 81 |
| 2 Tabulasi Data Pilot Tes..... | 86 |
| 3 Tabulasi Hasil Penelitian..... | 91 |
| 4 Hasil Uji Coba..... | 99 |
| 6 Uji Normalitas | 103 |
| 7 Uji Multikolinearitas | 103 |
| 7 Uji Heterokedastisitas..... | 104 |
| 8 Uji Koefesien Derteminasi..... | 104 |
| 9 Uji Regresi Berganda..... | 105 |
| 10 Uji F..... | 106 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik ditambah biaya pemilu yang sangat besar yang mengakibatkan masalah antara lain korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan aparatur negara tidak mencintai bangsanya lebih tepatnya aparatur negara yang hanya mencari kebutuhan hidup berupa uang atas negara yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Hal ini telah menghambat proses pemulihan ekonomi, mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, menyebabkan munculnya masalah di berbagai daerah. Bahkan banyak berlangsungnya praktek dan perilaku yang tidak sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan alasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator.

Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik (Loina, 2003). Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Melihat kejadian ini, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan. *Good Governance Government* menurut Dedi Kusmayadi (2009) adalah “Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel”. Dengan terselenggaranya pemerintahan yang berasaskan *good governance* maka akan membuat setiap aktivitas pada organisasi publik dapat di pertanggung jawabkan terutama pertanggung jawaban secara finansial. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas publik pada akhirnya. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu kontrol jika terjadi penyimpangan (Abdul, 2007).

Sebagai sebuah konsep dalam pengoperasiannya GGG masih dirasakan baru di Indonesia. Dengan demikian sudah wajar apabila untuk penerapannya di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

Pertama, kurangnya upaya untuk merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien. Hampir semua pemerintahan daerah tidak melakukan perombakan dalam struktur organisasinya yang disebut dengan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Walaupun upaya ini didukung oleh top pimpinan setempat, dari para pejabat di dinas-dinas. Beralasan apabila para pejabat di dinas-dinas menentang upaya ini, karena efeknya akan menghilangkan jabatan yang ia miliki. Padahal selama ini jabatan bagi pegawai negeri berhubungan erat dengan kekuasaan, dan kekuasaan berhubungan erat dengan uang. Untuk itu banyak birokrat yang menggunakan jasa DPRD sebagai alat untuk mempertahankan jabatannya.

Kedua, kurangnya upaya untuk memberikan insentif terhadap prestasi kondisi dalam tubuh birokrasi, saat ini lebih terbuka dibandingkan sebelumnya, dimana dahulunya hampir tidak mungkin birokrat melakukan inovasi karena akan ditekan dengan alasan menyimpang dari kebijaksanaan. Saat ini peluang menggunakan inovasi lebih dimungkinkan, namun memotret situasi birokrasi secara keseluruhan menunjukkan kuatnya para digma lama yang menghambat birokrasi di daerah. Walaupun birokrasi di daerah sudah merasa “familiar” dengan istilah merit system, namun hanya digunakan lip servise saja dan belum banyak dipraktekkan dalam bentuk tindakan. Ketiga, merebaknya gejala Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Sampai saat ini praktek KKN masih terjadi, proses sogok-menyoqok antar instansi pemerintahan

sendiri masih berjalan. Sumberdaya daerah yang mengecil akibat krisis menjadi salah satu penyebab semakin maraknya korupsi. Salah satu penyebabnya adalah prosedur persetujuan proyek dalam APBD yang cukup panjang dan tertutup. Korupsi juga masih marak pada proses pengangkatan pimpro dan proses pencairan dana, mark-up proyek dan kickback masih terjadi, walaupun besarnya agak berkurang dibandingkan masa sebelum reformasi. Satu-satunya perubahan yang signifikan terjadi pada proyek fiktif yang diamsa lalu kerap terjadi, saat ini jauh berkurang.

Keempat, rendahnya kualitas pelayanan public Pelayanan perizinan pemerintah daerah seringkali dikeluhkan oleh masyarakat karena prosedur kepengurusannya berbelit-belit dan tidak transparan, tidak adanya kepastian waktu dan mahal biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa pemerintah daerah berupaya memperbaiki pelayanan perizinannya dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Pembentukan UPT di beberapa kota yang difasilitasi oleh LSM bekerja sama dengan Lembaga Donor. Hambatan yang paling kuat dalam pembentukan UPT adalah resistensi yang kuat dari dinas-dinas yang merasa kewenangannya diambil oleh UPT. Selama ini pelayanan perizinan dijadikan sumber pendapatan tambahan bagi dinas-dinas tersebut. Kompromi yang dilahirkan adalah menjadi UPT sebagai tempat pengambilan berkas persyaratan permohonan izin tetapi proses dan penandatanganan izin dilakukan di dinas-dinas terkait.

Kelima, kurangnya ruang gerak partisipasi. Hambatan terbesar yang menjadikan aparat pemerintah daerah kurang berminat menerapkan penerapan

partisipatoris adalah karena pendekatan ini akan banyak memakan waktu dan kurang bisa diprediksi hasilnya. Tidak ada jaminan tepat waktu, sangat fatal bagi penilaian kinerja birokrasi yang sampai saat ini masih menggunakan pendekatan proyek.

Upaya menyusun dokumen yang melibatkan stakeholders yang lebih luas tetap dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan “Proyek”, ini mengindikasikan bahwa proses partisipatoris seperti “dialog stakeholders” tetap rentan dari praktek-praktek KKN dan rentseeking. (<http://hisabdunia.blogspot.com/2009/04/good-government-governance-manfaat-danhtml>)

Audit internal ialah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Kegiatan audit internal dilaksanakan dalam berbagai lingkungan yang berbeda-beda dan dalam organisasi-organisasi yang tujuan, ketentuan, serta kebiasaanyang berbeda, maka akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan internal di masing – masing lingkungan. Karena itu, penerapan standar profesi ini perlu diatur dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat unit audit internal melaksanakan kewajiban yang ditugaskan kepadanya. kesesuaian dengan konsep-konsep yang telah telah dinyatakan dalam standar ini sangatlah penting apabila para auditor internal ingin memenuhi tanggung jawabnya (Hiro Tugiman, 2006). Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyebutkan saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan. Kelemahan pertama adalah bersifat *inherent* yaitu, tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah, sedangkan kelemahan

kedua bersifat struktural yaitu masalah kelembagaan audit pemerintah pusat dan daerah yang *overlapping* satu dengan lainnya sehingga pelaksanaan pengendalian serta audit tidak efisien dan efektif (BPPK, 2010). Fungsi audit internal dalam hal ini yang berperan dalam melakukan pemeriksaan internal yaitu inspektorat daerah kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan urusan pemerintah desa, pelaksanaan TP dan PHLN, dan pengusutan atas laporan pengaduan masyarakat (PP/79/2005).

Gusnardi (2008) menyatakan audit internal yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian audit internal secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *GGG*. Artinya apabila audit internal dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan standar profesi, maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan *GGG*.

Untuk mendukung *GGG* perlu adanya penatausahaan yang benar. Menurut Abdul (2007) dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2012:24) menjelaskan pengertian *Pengelolaan Keuangan Daerah* adalah : “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.

Pada prinsipnya kegiatan tata usaha keuangan daerah dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu: Pertama tata usaha umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya, Kedua tata usaha keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: Kepastian terjadinya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusanpemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatanlain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang.

Pada tahun 2011 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, menyatakan Kota Bukittinggi sebagai daerah dengan dugaan kasus korupsi paling tinggi di Sumatera Barat. Dari hasil monitoring Kota Bukittinggi menduduki peringkat teratas terdapatnya dugaan kasus korupsi di Sumbar, kemudian baru disusul

Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Disamping itu dari monitoring LBH Padang dugaan kasus korupsi di daerah itu saat ini telah mencapai 17 kasus. Hasil monitoring LBH Padang terkait kasus korupsi di provinsi itu berdasarkan audit dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK), data Kejaksaan, laporan masyarakat, serta hasil dari investigasi media massa setempat. Munculnya Kota Bukittinggi sebagai daerah paling rawan akan korupsi di Provinsi Sumbar dari data LBH Padang, terkait dengan banyaknya proyek pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut, dimana sektor itu juga merupakan penyumbang peluang terbesar terjadinya korupsi di daerah itu (republika.co.id).

Dari Fenomena *GGG* yang terjadi saat ini mengisyaratkan tentang pengaruh audit internal dan penatausahaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan kinerja pemerintahlah yang dapat kita lihat sebagai patokan apakah *GGG* sudah berjalan dengan baik atau belum. Bukti keberhasilan tersebut salah satunya adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas di seluruh aspek dan tatanan pejabat pemerintah (Dedi, 2009).

Melihat fenomena yang terjadi pada audit internal dan penatausahaan keuangan daerah yang selalu terjadi dan berkaitan satu sama lain terhadap *GGG*, maka penulis memberi judul penelitian ini **“Pengaruh Audit Internal dan penatausahaan keuangan daerah Terhadap *Good Government Governance* Pada kota Bukittinggi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana audit internal berpengaruh kepada *good governance government*
2. Sejauh mana penatausahaan keuangan daerah berpengaruh kepada *good governance government*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Audit internal berpengaruh kepada *good governance government*.
2. Penatausahaan keuangan daerah berpengaruh kepada *good governance government*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi Memberikan informasi tentang kaitan antara audit internal, penatausahaan keuangan daerah dengan *good governance government*.
2. Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pelaksanaan audit internal dan penatausahaan keuangan daerah. Salah satunya dalam mata kuliah konsentrasi akuntansi sektor publik.

3. Memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya audit internal dan penatausahaan keuangan daerah, agar dapat mencapai *good governance government* dan sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teory

1. Pengertian *Good Governance Government*

Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.

Good governance bukanlah konsep baru, konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan, 2004:223) *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah – masalah kenegaraan.

Menurut Rhodes (Pratikno, 2005) Penggunaan istilah *governance* digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah *governance* telah digunakan untuk menegaskan signifikansi perlunya perubahan proses, metode dan capaian pemerintahan.

Good Government Governance menurut Dedi (2009) adalah “Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif,

transparan, profesional, dan akuntabel”. Karakteristik *Good Government* dapat kita lihat dari:

1. *Partisipasi masyarakat*, artinya, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Aturan hukum*, Tegaknya supremasi hukum, artinya, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. *Tranparansi* artinya, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. *Sikap responsif* artinya, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. *Berorientasi pada konsensus* artinya, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan apabila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. *Kesetaraan/kesederajatan* artinya, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. *Efektifitas dan efisiensi*, artinya proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. *Akuntabilitas*, artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. *Visi strategis*, artinya para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2. Audit Internal

a) Pengertian audit internal

Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak

yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan (Sukrisno, 2004).

Menurut Hiro (2006), internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan..

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian yang dilakukan oleh pegawai organisasi itu sendiri.
2. Walaupun penilaian dilakukan oleh organisasi, namun sifat penilaian yang dilakukan haruslah independen dan objektif.
3. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen organisasi secara langsung.
4. Audit internal dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong ditaatinya kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.

b) Tujuan audit internal

Menurut Hiro(2006) tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran.

Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Menurut Sukrisno (2004), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, sarandan komentar mengenai kegiatan yang dipiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembang kan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
- b) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan di pertanggung jawab kan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalah gunaan.
- d) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
- e) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- f) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

c) Lingkup Pemeriksaan Audit Internal

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal atau audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta keefektifitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Lingkup pelaksanaan pemeriksaan internal audit menurut Hiro (2006) yaitu terdiri atas:

1. Perencanaan pemeriksaan

Pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan internal harus di dokumentasikan dan meliputi hal – hal berikut ini :

a) Penetapan tujuan dan lingkup pekerjaan.

1. Tujuan pemeriksaan adalah pernyataan paling luas yang dihasilkan oleh pemeriksa internal dan menyebutkan berbagai hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan. Berbagai tujuan dan prosedur pemeriksaan secara bersama – sama akan menyatakan lingkup pekerjaan pemeriksaan internal.
2. Tujuan dan prosedur pemeriksaan haruslah ditujukan pada berbagai risiko yang berhubungan dengan kegiatan yang akan diperiksa. istilah risiko merupakan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kegiatan yang akan diperiksa.

3. Tujuan pemeriksaan risiko yang dilakukan pada persiapan adalah untuk menentukan area yang penting dalam kegiatan yang akan diperiksa.
- b) Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.
1. Peninjauan atas review terhadap informasi dasar haruslah dilakukan untuk menentukan dampaknya terhadap pemeriksaan. Hal – hal tersebut mencakup hal – hal berikut:
 - 1) Pernyataan tentang tugas.
 - 2) Informasi Organisasi
 - 3) Informasi Anggaran
 - 4) Kertas kerja pemeriksaan yang sebelumnya
 - 5) Hasil – hasil dari pemeriksaan sebelumnya
 - 6) Hasil – hasil dari pemeriksa lainnya
 - 7) File – file pembandingan
 - 8) Literatur – literatur teknis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang
 2. Berbagai keperluan pelaksanaan pemeriksa lainnya, seperti jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, luas periode yang akan diperiksa, dan perkiraan saat selesainya pemeriksaan haruslah ditentukan. Harus pula dipertimbangkan bentuk laporan pemeriksaan final karena perencanaan yang tepat pada tahap ini akan memudahkan penulisan laporan pemeriksaan yang final.

3. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
 - a. Jumlah dan tingkat pengalaman staf pemeriksa yang diperlukan haruslah didasarkan pada evaluasi sifat dan tingkat kesulitan dari tugas pemeriksaan , batas waktu penyelesaian, dan tenaga yang tersedia.
 - b. Pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu dari staf pemeriksa haruslah dipertimbangkan dalam pemilihan pemeriksa yang akan ditugaskan.
 - c. Latihan yang dibutuhkan oleh para pemeriksa harus pula dipertimbangkan karena tiap – tiap tugas pemeriksaan akan berfungsi sebagai dasar tercapainya perkembangan yang dibutuhkan oleh bagian audit internal.
 - d. Pertimbangan penggunaan tenaga eksternal apabila terdapat kebutuhan akan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu tambahan.
4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dianggap perlu.
 - a) Haruslah dilakukan rapat dengan manajemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan diperiksa
 - b) Rangkuman hal – hal yang didiskusikan pada rapat dan berbagai kesimpulan yang dihasilkan haruslah dibuat, didistribusikan kepada individu – individu yang memerlukan , dan disimpan dalam kertas kerja pemeriksaan.
5. Melaksanakan survei secara tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko – resiko dan pengawasan – pengawasan, untuk

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan

6. dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
 - a) Survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara terperinci, tentang kegiatan yang akan diperiksa.
 - b) Survei menghasilkan berbagai keterangan yang akan dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan, serta merupakan suatu alat yang efektif bagi penentuan penggunaan sumber daya bagian pemeriksaan internal secara efektif
 - c) fokus suatu survei bermacam – macam, tergantung pada sifat atau keadaan pemeriksaan.
 - d) Lingkup pekerjaan dan waktu yang diperlukan bagi pelaksanaan survey bermacam – macam.
 - e) Survei meliputi penggunaan prosedur – prosedur diskusi dengan pihak yang akan diperiksa, wawancara dengan individu yang terpengaruh dengan kegiatan yang akan diperiksa, observasi lapangan, peninjauan atau review terhadap laporan dan penelitian yang dilakukan oleh manajemen, prosedur pemeriksaan analisis, pembuatan bagan atau arus flowchart, melakukan pengujian terhadap pelaksanaan pekerjaan tertentu, dan mendokumentasikan aktivitas kunci pengendalian.

- f) Pada akhir survei harus dibuat suatu risalah tentang hasil survei, yang isinya harus mengidentifikasi persoalan pemeriksaan,.
- g) Penulisan program pemeriksaan
- h) Menentukan bagai mana, kapan, dan kepada siapa hasil–hasil pemeriksaan akan disampaikan. Pimpinan audit internal bertanggung jawab menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan. hasil pemeriksaan tersebut haruslah di dokumentasikan, dapat dibuktikan, dan diberitahukan kepada manajemen.
- i) Memperoleh persetujuan bagai rencana kerja pemeriksaan. Pada rencana kerja pemeriksaan haruslah disetujui secara tertulis oleh pimpinan audit internal dan harus disetujui dalam waktu yang tepat.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Pemeriksa internal harus mengumpulkan , menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :

- a) Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
 1. Pemeriksa internal mempergunakan berbagai prosedur pemeriksaan analitis pada saat menguji dan mengevaluasi informasi.

2. Prosedur pemeriksaan analitis dilakukan dengan cara meneliti dan memperbandingkan berbagai hubungan antara informasi finansial dan non finansial.
 3. Prosedur pemeriksaan analitis memberikan cara efisien dan efektif bagi audit internal dalam menilai berbagai informasi yang dikumpulkan selama pemeriksaan.
 4. Prosedur pemeriksaan sangat berguna dalam mengidentifikasi hal perbedaan, kesalahan, ketidakteraturan.
 5. Prosedur pemeriksaan analitis dapat dilakukan dengan melakukan jumlah moneter, kuantitas fisik dan persentase.
- b) Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
 - c) Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan.
 - d) Proses pengumpulan analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan

Pemeriksaan internal harus melaporkan hasil – hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. Yang meliputi :

- a) Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan.
- b) Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir.
- c) Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu
- d) Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan.

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Audit internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan – temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan lanjut yang tepat.

- a) Tindak lanjut didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan waktu.
- b) Sifat, ketepatan waktu dan luas tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan audit internal.

3. Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Abdul (2007) dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2012:24) menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

“keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyatakan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) diharuskan membuat Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian tujuan dari prosedur penatausahaan keuangan daerah adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam kaitan dengan landasan hukum dan jangka waktu, maka asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- A. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
- B. APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.
- C. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- D. Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggung jawaban APBD adalah mata uang rupiah.

Dalam kaitannya dengan pendapatan asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- a) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.
- b) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknyanya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan

sedangkan yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Sedangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah dibidang belanja dan fungsi kas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- b. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- c. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- d. Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah terkecuali untuk Badan Pelayanan Umum.

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi pada (2008) berjudul Analisis Faktor audit internal dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Dan data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berasal dari kuesioner. Penelitian tersebut menghasilkan komitmen Secara simultan audit internal yang meliputi

independensi, kemampuan profesional, lingkup pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian audit internal secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Artinya apabila audit internal dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan standar profesi, maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN Tbk di Indonesia. Dan secara parsial, variabel independensi, variabel kemampuan profesional, variabel lingkup pekerjaan, variabel pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan variabel manajemen bagian audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN Tbk Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusmayadi pada tahun 2010 dengan objek penelitian di daerah Tasikmalaya. Penelitian ini berjudul Pengaruh pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap *good government governance* (survey pada pemerintahan Tasikmalaya). Data dari penelitian ini didapat dari survey. Dan uji reliabilitas menggunakan *alpha conbach*. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance*. Pengaruh secara simultan pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap *good overnment governance* adalah sebesar 19,2%. Sedangkan pengaruh secara parsial pengawasan intern terhadap *good government governance* adalah sebesar 6% dan pengaruh secara parsial penatausahaan keuangan daerah terhadap *good government governance* adalah sebesar 13,2%. Yang membedakan penelitian penulis dengan Tb. Aman Faturahman adalah terletak pada tempat penelitian yang digunakan serta variabel dependennya.

Penulis menggunakan pengawasan intern, sedangkan Tb. Aman Faturahman menggunakan pengendalian intern pada kas. Dan perbedaan penelitian penulis dengan Gusnardi terletak pada tempat penelitian serta variabel dependennya. Penulis memakai *good governance government* sedangkan Gusnardi menggunakan *good corporate government*. Sedangkan pada peneliti Dedi Kusmayadi, perbedaannya terletak dari tempat penelitiannya saja. Namun lebih menekankan pada pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Julianet Farrah Boekorsjom pada tahun 2013 dengan objek penelitian di Papua. Penelitian ini berjudul pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien *standardized* antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* $r = 0,703$, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. Karena nilai kontribusi variabel penatausahaan keuangan daerah lebih besar dari >0 , artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai variabel penatausahaan keuangan daerah maka semakin baik variabel penerapan *good governance*. Kemudian untuk nilai koefisien determinansinya sebesar 49,42%, ini artinya terdapat pengaruh yang cukup kuat antara penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*.

C. Hubungan Antar Variabel

a. Keterkaitan Variabel Audit Internal dengan *Good Government Governance*

Audit internal yang dilakukan secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah, manajemen akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi masalah serta sebab- sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan, atau secara tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, sumber-sumber penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. Efektifnya peran audit internal didalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan sehingga tercipta *good government governance*. (Hery,2010)

Begitu pula dengan peran audit internal pada BUMN sangat diperlukan dalam membantu manajemen dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya peran audit internal tersebut, diharapkan manajemen dapat mencurahkan perhatian pada petugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari – hari atas perusahaan milik Negara tersebut dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggung jawabnya. Keberadaan audit internal pada instansi pemerintah diatur berdasarkan undang-undang RI No 19 tahun 2003 mengenai BUMN. Audit internal merupakan bagian dari kegiatan suatu perusahaan yang integral dan berfungsi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Peran yang sangat besar dalam perusahaan akan member kontribusi bagi pihak manajemen dan auditor eksternal. Kegiatan audit internal meliputi pengujian dan penilaian efektifitas dan kecukupan

sistem pengendalian internal yang ada dalam perusahaan. Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi, manajemen puncak lainnya dan auditor ekstern tidak memiliki sumber informasi internal yang dapat diandalkan mengenai kinerja perusahaan (Kell and Boynton, 2006).

Hubungan pengaruh audit internal terhadap penerapan good governance government juga dibuktikan dalam Hasil penelitian yang dilakukan Wardoy dan Lena (2010), Gumilang (2009), serta Kusmayadi (2009). Hal ini disebabkan karena audit internal mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan kode etik dan standar profesi audit internal sehingga terjadi kesalahan dan kecurangan dapat dideteksi dan diperbaiki. Audit internal mampu menilai dan mengevaluasi operasi perusahaan sehingga membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang handal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, diantaranya: informasi keuangan yang handal, informasi mengenai manajemen resiko, informasi mengenai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta informasi mengenai ketaatan terhadap peraturan.

b. Keterkaitan Variabel Penatausahaan Keuangan Daerah dengan *Good*

Government Governance

Laporan keuangan daerah merupakan bukti pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun masyarakat luas. Sebab laporan keuangan daerah berisikan seluruh kegiatan penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat penatausahaan keuangan daerah tentang kesesuaian dana yang ada dan pengelolaan keuangan daerah yang direalisasikan pada kegiatan-kegiatan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan.

Dari laporan keuangan pula bisa dilihat bahwa pemerintah sudah menjalankan penatausahaan keuangan daerah yang baik, berkurangnya praktik KKN, dan kinerja pemerintahan sendiri agar terciptanya *Good Governance* yang akan terasa langsung oleh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan rakyat.

Hasil laporan keuangan yang andal, jujur, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan adalah syarat bahwa kualitas informasi keuangan yang disajikan baik. Kualitas informasi yang baik adalah suatu penilaian yang diberikan oleh BPK pada setiap penyajian laporan keuangan daerah.

Menurut Dedi Kusmayadi (2009) penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin efisien dan efektifnya penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian *good governance* yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Menurut Nurlan Darise dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2009:18) keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak

langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Menurut Azlim, Darwanis, dan Usman (2012) penerapan *good governance* signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Pelaksanaan *good governance* harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku saat ini, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar - besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip - prinsip *good governance* juga tidak lepas dari masalah yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hubungan antara penerapan *good governance* dan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip secara konsisten.

Jumlah komponen atau prinsip yang melandasi *good governance* bervariasi dari satu instansi ke instansi lainnya dari satu pakar ke pakar yang lainnya. Namun pada dasarnya dalam setiap penyelenggaraan *good governance*, paling tidak ada sejumlah Prinsip-prinsip yang melandasi *good governance* yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawabannya dalam bingkai *good governance* (Rosjidi, 2004).

keuangan pemerintah daerah sebelum reformasi baik menyangkut anggaran maupun akuntansi tidak mendukung mekanisme *Good Governance* bagi entitas pemerintahan yang merupakan cita-cita Indonesia baru yang didengungkan sejak RI memasuki era reformasi.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusmayadi (2009) mengenai penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin efisien dan efektifnya penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian *good governance* yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Nurlan Darise dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2009:18) keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap good government governance pada Kota Bukittinggi. Ini berarti Audit internal dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada good governance government.
2. Penatausahaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap good government governance pada Kota Bukittinggi. Ini berarti peningkatan Penatausahaan keuangan daerah menyebabkan good government governance pada Kota Bukittinggi menjadi meningkat.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R²* adalah sebesar 0,162 atau sebesar 16,2%. Ini berarti bahwa kontribusi variabel dependen terhadap variabel independen hanya sebesar 16,2%. Dengan kata lain masih terdapat

variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar bagi Good Governance Government pada Kota Bukittinggi

2. Peneliti hanya meneliti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kota Bukittinggi, sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian masih rendah.

C. Saran

Saran yang diberikan adalah:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara langsung maupun tidak langsung agar tercipta pemerintahan yang lebih baik.

2. Bagi akademisi

diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahanreferensi dan menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

3. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel akuntabilitas, pengawasan intern dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Angus Okechukwu Unegbu & Mohammed Isa Kida, *Effectiveness of Internal as Instrument of Improving Public sector Management*.ISSN: 2141-7042
- Azlim, Darwanis, & Usman Abu Bakar.2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi, Vol.1, No.1, 2012
- Baswir. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE.
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N., and Kell, Walter G., *Modern Auditing, Seventh Edition*, John Wiley and Sons, Inc, 2006
- Dedi Kusmayadi. (2009).Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank. Jurnal Keuangan dan Perbankan.Vol.16, No. 1.Hal 147-156
- Dedi Kusmayadi. (2010).Pengaruh Pengawasan Intern Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Government Governance.
- Dr.Djokosantoso Moeljono. 2006. *Good Governance Culture*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Dwi Pebriana. (2012).Pengaruh Audit Internal dan Pengawasn Intern Terhadap *Good Governance Government* Pada Dinas SKPD di Wilayah Kabupaten Cianjur.Skripsi.UNIKOM